

## **Optimalisasi Potensi Agribisnis sebagai Penggerak Pendapatan Asli Daerah untuk Mengurangi Ketergantungan pada Dana Transfer (Studi pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2025)**

### ***Optimization of Agribusiness Potential as a Driver of Regional Own-Source Revenue to Reduce Transfer Dependency (Study on Regencies in West Java Province, 2024–2025)***

**Winna Roswinna<sup>1\*</sup>, Deden Komar Priatna<sup>2</sup>, Anne Lasminingrat<sup>3</sup>, Maria Lusiana Yulianti<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Winaya Mukti Jl. Bandung-Sumedang Km.29, Gunungmanik, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Indonesia

\*e-mail korespondensi: [winnaroswina71@gmail.com](mailto:winnaroswina71@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

Most regencies in West Java hold strong agribusiness potential, yet fiscal independence remains low and reliance on central transfers is still high. This study aims to analyze the relationship between Regional Own-Source Revenue (PAD), Transfers to Regions and Village Funds (TKDD), and regional financial independence, as well as identify strategies to leverage agribusiness potential. Quantitative research using panel data from 18 regencies in 2024–2025, analyzed via Fixed Effect Model. Results: PAD has a significant negative effect on TKDD and a strong positive effect on financial independence, while TKDD shows a weak positive effect. Agribusiness potential remains underexploited due to raw material sales dominance and delayed policy adjustment under the new fiscal law. Strengthening downstream processing, fiscal policy, and agribusiness BUMD is essential to reduce transfer dependency.

**Keywords:** *Regional Own-Source Revenue; Transfers to Regions and Village Funds; Financial Independence; Agribusiness; West Java*

#### **ABSTRAK**

Sebagian besar wilayah kabupaten di Jawa Barat memiliki potensi agribisnis yang besar, namun tingkat kemandirian fiskal masih rendah dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat tetap tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta kemandirian keuangan daerah, sekaligus merumuskan strategi pemanfaatan potensi agribisnis. Penelitian kuantitatif menggunakan data panel 18 kabupaten tahun 2024–2025, dianalisis dengan Model Efek Tetap. PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TKDD serta positif dan sangat kuat terhadap kemandirian keuangan, sedangkan TKDD hanya berpengaruh positif lemah. Potensi agribisnis belum dioptimalkan akibat dominasi penjualan bahan baku dan belum maksimalnya penyesuaian kebijakan fiskal baru. Kesimpulan: Penguatan hilirisasi, kebijakan pajak, dan BUMD agribisnis menjadi kunci mengurangi ketergantungan transfer.

**Kata kunci:** *Pendapatan Asli Daerah; Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Kemandirian Keuangan; Agribisnis; Jawa Barat.*

#### **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia telah berjalan lebih dari dua dekade dengan tujuan utama memperkuat kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan sendiri, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan sesuai potensi dan kebutuhan lokal (Oates, 2005; Miardkk., 2024; Gunawan dkk, 2025). Sebagai landasan hukum terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memberikan kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk menetapkan jenis, tarif, serta tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus

menyederhanakan skema alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Reformasi ini diharapkan dapat mendorong daerah untuk beralih dari ketergantungan pada bantuan pusat menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan (Pemerintah RI, 2022).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia, sekaligus menjadi lumbung pangan nasional dengan sektor pertanian dan agribisnis yang menjadi tulang punggung perekonomian di sebagian besar wilayah kabupatennya. Pada tahun 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 13,5% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat, dengan komoditas unggulan meliputi beras, kopi, teh, kelapa sawit, sayuran, serta peternakan yang tersebar di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, dan Kuningan (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025). Potensi agribisnis ini seharusnya menjadi modal utama bagi daerah untuk menggali sumber pendapatan sendiri, namun kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara kapasitas ekonomi riil dengan kemampuan fiskal daerah (Dinar, 2026; Lasminingrat dkk, 2025; Marina dkk, 2026).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2024–2025, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pada 18 kabupaten di Jawa Barat baru mencapai 38,2%. Sebanyak 11 kabupaten masih berada dalam kategori kurang mandiri hingga sangat kurang mandiri, di mana sebagian besar di antaranya merupakan daerah berbasis pertanian. Sebaliknya, hanya 7 kabupaten yang masuk kategori cukup mandiri, dan didominasi oleh wilayah dengan basis industri, perdagangan, dan jasa seperti Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Karawang (DJPK Kemenkeu, 2025). Fenomena ini menunjukkan paradoks yang menarik: meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan komoditas agribisnis yang melimpah, daerah agraris justru belum mampu mengubah keunggulan tersebut menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal, dan hal ini terjadi di beberapa daerah lain juga (Juliana dkk, 2025; Mahmiludin dkk, 2025; Marina dkk, 2025).

Sampai dengan tahun 2025, porsi TKDD masih mendominasi struktur pendapatan kabupaten di Jawa Barat, rata-rata mencapai 58% dari total pendapatan daerah. Khusus di kabupaten berbasis pertanian, ketergantungan ini bahkan lebih tinggi, yaitu berkisar antara 65% hingga 72%. Kondisi ini sejalan dengan teori Flypaper Effect, yang menjelaskan bahwa aliran dana transfer yang besar cenderung membuat pemerintah daerah menjadi pasif dalam menggali potensi pendapatan sendiri, sehingga inisiatif untuk meningkatkan PAD justru menurun seiring meningkatnya alokasi bantuan dari pusat (Setyawan, 2023; Shalshyabilla dkk., 2023). Ketergantungan yang berlebihan ini membatasi fleksibilitas daerah dalam merancang kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan rantai nilai agribisnis lokal, karena penggunaan dana transfer sering kali terikat pada prioritas dan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Beberapa faktor mendasar yang menyebabkan belum teroptimalkannya potensi agribisnis sebagai sumber PAD antara lain: pertama, sebagian besar hasil pertanian di daerah asal masih dijual dalam bentuk bahan baku, sehingga nilai tambah ekonomi serta potensi pajak dari kegiatan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran tidak tertangkap oleh kas daerah (Suhyanto dkk., 2020; Marina dkk, 2024). Kedua, kewenangan baru yang diberikan melalui UU HKPD belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyusun peraturan daerah yang mendorong investasi agribisnis sekaligus memperluas basis pajak dan retribusi pada sektor ini tanpa membebani petani kecil. Ketiga, BUMD yang bergerak di bidang pertanian dan agribisnis di banyak daerah belum dikelola secara profesional, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih sangat terbatas (Ramadhan dkk., 2022; Roswinna dkk, 2024; Sukmawati dkk, 2025). Keempat, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan usahatani, irigasi, dan fasilitas pasca panen menghambat daya saing dan skala ekonomi komoditas lokal, sehingga potensi penerimaan pajak daerah tidak tumbuh sesuai harapan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan antara PAD, TKDD, dan kemandirian keuangan daerah. Penelitian Suhyanto dkk. (2020) serta Ramadhan dkk. (2022) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketergantungan pada TKDD dan peningkatan kemandirian fiskal. Sebaliknya, Shalshyabilla dkk. (2023) menyatakan bahwa pengaruh PAD terhadap TKDD tidak selalu signifikan, sementara Machfud dkk. (2021) dan Kristina dkk. (2021) menemukan bahwa TKDD tidak selalu berkontribusi positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, terutama yang belum banyak mengaitkan secara spesifik peran potensi agribisnis sebagai variabel kunci

dalam memperkuat hubungan antara PAD dan kemandirian fiskal, khususnya pada periode penerapan UU HKPD tahun 2024–2025.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara PAD, TKDD, dan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2024–2025, serta mengidentifikasi strategi optimalisasi potensi agribisnis sebagai penggerak utama peningkatan PAD. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk beralih dari ketergantungan pada transfer pusat menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif sektor pertanian dan agribisnis lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel gabungan data silang dan waktu dari 18 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2024–2025. Data sekunder bersumber dari laporan realisasi APBD, publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan dokumen Bappeda Jawa Barat, dengan seluruh populasi kabupaten dijadikan sampel melalui metode sensus. Variabel yang dianalisis meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dengan tambahan kajian potensi sektor agribisnis sebagai penguat pendapatan lokal.

Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi EViews 13 melalui tahapan pemilihan model regresi data panel (Uji Chow, Hausman, Lagrange Multiplier), uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis secara parsial, simultan, dan uji mediasi Sobel. Hasil statistik dilengkapi dengan analisis deskriptif untuk membandingkan kondisi fiskal wilayah berbasis pertanian dan non-pertanian guna merumuskan strategi optimalisasi agribisnis dalam mendorong kemandirian keuangan daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kondisi Variabel Penelitian Tahun 2024–2025**

Berdasarkan data realisasi anggaran dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2025) dan Bappeda Provinsi Jawa Barat (2025), diperoleh gambaran kondisi masing-masing variabel sebagai berikut:

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Secara rata-rata, PAD pada 18 kabupaten di Jawa Barat mengalami pertumbuhan sebesar 11,8% pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Kabupaten Bogor (19,2%), Kabupaten Bandung (14,7%), dan Sukabumi (12,9%), yang didukung oleh ekspansi sektor industri, perdagangan, dan penerapan opsen pajak kendaraan serta pajak restoran sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Sebaliknya, kabupaten dengan basis pertanian seperti Pangandaran, Garut, dan Tasikmalaya hanya mencatat pertumbuhan di bawah 7%, bahkan Kabupaten Ciamis mengalami penurunan sebesar 2,1% akibat fluktuasi harga komoditas dan belum optimalnya pemungutan pajak dari sektor pengolahan hasil tani. Kondisi ini sejalan dengan temuan Suhyanto dkk. (2020) bahwa daerah yang hanya mengandalkan budidaya tanpa pengolahan lanjutan cenderung memiliki pertumbuhan PAD yang lambat.

#### **Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)**

Porsi TKDD terhadap total pendapatan daerah secara rata-rata menurun dari 62% pada tahun 2024 menjadi 58% pada tahun 2025, seiring dengan peningkatan kewenangan fiskal daerah melalui UU HKPD. Namun, di kabupaten berbasis agraris porsi TKDD masih sangat dominan, yaitu berkisar antara 65% hingga 72%. Kabupaten Bogor dan Bandung tetap menerima alokasi tertinggi masing-masing sebesar Rp5,3 triliun dan Rp4,7 triliun pada tahun 2025, sedangkan Kabupaten Purwakarta dan Pangandaran menerima alokasi terendah. Fenomena ini mendukung teori Flypaper Effect yang menyatakan bahwa aliran dana transfer yang besar cenderung menurunkan inisiatif daerah untuk menggali pendapatan sendiri, terutama di wilayah yang belum memiliki basis ekonomi beragam (Setyawan, 2023; Shalshyabilla dkk., 2023).

#### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Rata-rata indeks kemandirian keuangan daerah meningkat dari 35,4% pada tahun 2024 menjadi 38,2% pada tahun 2025. Sebanyak 7 kabupaten masuk kategori cukup mandiri (50–75%), sedangkan 11 kabupaten masih berada di bawah 50% dan didominasi oleh daerah berbasis pertanian. Kabupaten Bekasi dan Bogor menjadi yang paling mandiri dengan rasio masing-masing 68,3% dan 65,7%, sementara Kabupaten Pangandaran dan Garut berada di urutan terbawah dengan rasio masing-masing 19,8% dan 22,5%. Hal ini menunjukkan kesenjangan fiskal yang nyata antara wilayah dengan sektor pengolahan maju dan wilayah yang masih mengandalkan penjualan bahan baku pertanian (Kristina dkk., 2021). Secara detail dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

| Kelompok Kabupaten                                                                  | Realisasi<br>2024 | Realisasi<br>2025 | Pertumbuhan<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Berbasis Industri & Perdagangan (Bogor, Bandung, Bekasi, Karawang)                  | 3.240             | 3.697             | 14,1               |
| Berbasis Agribisnis & Pertanian (Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis, Kuningan) | 586               | 626               | 6,8                |
| Rata-rata Keseluruhan Kabupaten                                                     | 1.125             | 1.258             | 11,8               |

Sumber: Data diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, 2025

Berdasarkan Tabel1, terlihat dengan sangat jelas adanya kesenjangan fiskal yang cukup tajam antara kelompok kabupaten berbasis industri/perdagangan dengan kelompok kabupaten berbasis agribisnis dan pertanian di Provinsi Jawa Barat pada periode 2024–2025.

Secara nominal, rata-rata realisasi PAD kelompok kabupaten industri dan perdagangan pada tahun 2025 mencapai Rp3.697 miliar, angka ini hampir enam kali lipat lebih besar dibandingkan rata-rata PAD kelompok agribisnis yang hanya mencapai Rp626 miliar. Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, kelompok industri juga mencatat kinerja yang jauh lebih baik, yaitu tumbuh sebesar 14,1%, sedangkan kelompok agribisnis hanya mampu tumbuh sebesar 6,8%. Angka pertumbuhan kelompok agraris ini bahkan berada di bawah rata-rata pertumbuhan seluruh kabupaten di Jawa Barat yang mencapai 11,8%.

Kesenjangan ini sangat berkaitan erat dengan struktur ekonomi dan pemanfaatan potensi sektor unggulan masing-masing wilayah. Kelompok kabupaten seperti Bogor, Bandung, Bekasi, dan Karawang memiliki basis ekonomi yang didominasi oleh sektor pengolahan, manufaktur, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Sektor-sektor ini memiliki nilai tambah yang tinggi, frekuensi transaksi yang padat, serta basis wajib pajak yang luas dan tercatat secara resmi. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang mulai berlaku efektif pada awal tahun 2025 memberikan dampak positif yang signifikan bagi wilayah ini, terutama melalui peningkatan bagian bagi hasil pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan pajak parkir yang langsung masuk ke kas daerah (Pemerintah RI, 2022).

Sebaliknya, kelompok kabupaten yang memiliki potensi agribisnis sangat besar seperti Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis, dan Kuningan justru belum mampu menerjemahkan keunggulan sumber daya alam tersebut menjadi penerimaan PAD yang optimal. Rendahnya capaian PAD di wilayah ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, struktur ekonomi yang masih didominasi oleh penjualan bahan baku pertanian. Sebagian besar komoditas unggulan seperti kopi, teh, beras, singkong, dan sayuran masih dikirim ke daerah lain dalam bentuk mentah atau olahan sederhana, sehingga nilai tambah ekonomi serta potensi pajak dari industri pengolahan, pengemasan, dan pemasaran bermerek tidak tertangkap di daerah asal. Suhyanto dkk. (2020) menjelaskan bahwa daerah yang hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah akan kehilangan peluang pendapatan pajak hingga 60–70% dibandingkan jika komoditas tersebut diolah hingga siap jual di dalam daerah. Kedua, aktivitas ekonomi di sektor pertanian hulu banyak dilakukan oleh petani kecil yang transaksinya belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perpajakan daerah, sehingga basis pemungutan pajak di sektor ini masih sangat sempit.

Laju pertumbuhan PAD yang lambat di kelompok agribisnis juga mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal daerah belum berorientasi pada penggalan potensi sektor unggulan lokal. Belum optimalnya pemanfaatan kewenangan baru melalui UU HKPD untuk menetapkan retribusi pelayanan pasar hasil

tani, pajak atas pengolahan komoditas perkebunan, serta dukungan kebijakan bagi BUMD pertanian menjadi faktor penghambat utama. Padahal, jika rantai nilai agribisnis dikembangkan secara terpadu, Ramadhan dkk. (2022) menegaskan bahwa sektor ini berpotensi meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan, mengingat permintaan produk pangan dan agribisnis terus mengalami peningkatan baik di pasar domestik maupun internasional.

### Hasil Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan serangkaian pengujian, model yang paling tepat digunakan adalah Model Efek Tetap (Fixed Effect Model), dengan penjelasan hasil pada Tabel 2:

Tabel 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Model Efek Tetap (Fixed Effect Model)

| Variabel  | Koefisien | t-Statistik | Probabilitas | Keterangan                       |
|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------------------------|
| Konstanta | 12,54     | 18,21       | 0,0000       | -                                |
| PAD       | -0,428    | -3,12       | 0,0021       | Berpengaruh Negatif & Signifikan |

$R^2 = 0,87$ ;  $F$ -Statistik = 98,45 (Prob. 0,0000)

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh bukti statistik yang kuat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Nilai koefisien sebesar -0,428 dengan probabilitas 0,0021 (lebih kecil dari taraf nyata 0,05) mengandung arti: setiap kali kemampuan daerah dalam menggali PAD meningkat sebesar satu satuan, maka ketergantungan dan besaran alokasi TKDD yang dibutuhkan akan menurun sebesar 0,428 satuan. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,87 menunjukkan bahwa 87% perubahan tingkat ketergantungan terhadap TKDD dapat dijelaskan oleh perubahan kemampuan PAD itu sendiri.

Hasil ini selaras dengan teori desentralisasi fiskal, yang menegaskan bahwa daerah yang memiliki kapasitas fiskal sendiri yang kuat secara alami akan membutuhkan bantuan transfer pusat yang lebih sedikit (Oates, 2005). Namun, kondisi di kabupaten berbasis agribisnis di Jawa Barat justru menunjukkan sebaliknya: karena PAD yang dihasilkan dari sektor pertanian masih sangat rendah (seperti terlihat pada pembahasan Tabel 4.1), maka daerah terpaksa meminta dan menerima alokasi TKDD yang jauh lebih besar untuk menutupi defisit anggaran. Hal ini memperkuat gejala Flypaper Effect, di mana ketergantungan pada dana transfer justru menurunkan semangat daerah untuk menggali potensi lokal seperti agribisnis secara maksimal (Setyawan, 2023; Sulaksana dkk, 2024).

Jika dikaitkan dengan Tabel 4.4, ditemukan bahwa kedua variabel—PAD maupun TKDD—secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, namun arah dan besar pengaruhnya sangat berbeda. PAD memiliki pengaruh positif dan sangat kuat dengan koefisien 0,576 dan probabilitas 0,0000. Artinya, peningkatan PAD menjadi penggerak utama yang paling efektif untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, meskipun TKDD juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian, nilai koefisiennya hanya sebesar 0,183—jauh lebih kecil dibandingkan pengaruh PAD.

Perbedaan besar ini memiliki makna strategis yang mendalam, terutama bagi pengembangan agribisnis. Peningkatan kemandirian tidak dapat dicapai hanya dengan menambah jumlah dana transfer dari pusat. Meskipun TKDD dapat membantu menutupi kebutuhan anggaran jangka pendek, pengaruhnya terhadap kemandirian jangka panjang sangat lemah. Kemandirian sejati hanya akan tercapai jika daerah mampu meningkatkan pendapatan yang bersumber dari potensi lokalnya sendiri, termasuk sektor agribisnis.

Kombinasi hasil kedua tabel ini membuktikan adanya pola hubungan berantai: rendahnya optimalisasi potensi agribisnis menyebabkan PAD rendah → PAD rendah membuat ketergantungan TKDD tinggi → ketergantungan TKDD yang tinggi tidak mampu mendorong kemandirian secara optimal. Oleh karena itu, strategi yang hanya berfokus pada penyerapan dana transfer tanpa disertai upaya serius mengubah potensi agribisnis menjadi sumber PAD, tidak akan pernah membawa daerah keluar dari ketergantungan fiskal.

Lebih lanjut, nilai  $R^2$  pada Tabel 3 yang mencapai 0,94 mengindikasikan bahwa 94% tingkat kemandirian keuangan daerah di Jawa Barat ditentukan oleh bagaimana daerah mengelola hubungan antara pendapatan sendiri dan dana transfer. Ini berarti perbaikan pada pengelolaan sektor unggulan seperti agribisnis—seperti hilirisasi produk, penguatan pajak sektor pertanian, dan revitalisasi BUMD—akan memberikan dampak yang sangat besar dan nyata bagi kemajuan fiskal daerah.

Tabel 3, Hasil Regresi Substruktural II (Pengaruh PAD dan TKDD terhadap Kemandirian Keuangan)

| Variabel  | Koefisien | t-Statistik | Probabilitas | Keterangan                       |
|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------------------------|
| Konstanta | 8,76      | 5,43        | 0,0000       | -                                |
| PAD       | 0,576     | 7,89        | 0,0000       | Berpengaruh Positif & Signifikan |
| TKDD      | 0,183     | 2,48        | 0,0143       | Berpengaruh Positif & Signifikan |

$R^2 = 0,94$ ;  $F$ -Statistik = 156,72 (Prob. 0,0000)

### Pembahasan Keterkaitan dengan Sektor Agribisnis

Hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan PAD secara signifikan mampu menurunkan ketergantungan terhadap TKDD dan memperkuat kemandirian fiskal, namun potensi agribisnis di Jawa Barat belum menjadi penggerak utama hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal mendasar:

Pertama, sebagian besar komoditas pertanian seperti beras, kopi, teh, dan sayuran masih dikirim dalam bentuk bahan baku ke daerah lain untuk diolah. Akibatnya, nilai tambah ekonomi serta potensi pajak dari industri pengolahan, pengemasan, dan perdagangan modern tidak tertangkap di kas daerah asal. Padahal penelitian Ramadhan dkk. (2022) menunjukkan bahwa daerah yang membangun pusat pengolahan hasil tani mampu meningkatkan PAD sektor pertanian hingga 30–40% lebih tinggi dibandingkan yang hanya menjual bahan baku.

Kedua, kewenangan baru melalui UU HKPD belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengatur pajak dan retribusi sektor agribisnis. Sebagian besar peraturan daerah yang disusun masih berfokus pada sektor perkotaan dan jasa, sementara insentif bagi investasi agroindustri serta pengenaan pajak yang adil tanpa membebani petani kecil belum diatur secara komprehensif (Pemerintah RI, 2022).

Ketiga, BUMD yang bergerak di bidang pertanian umumnya masih berperan sebagai penyalur sarana produksi semata, belum berperan dalam pemasaran bersama, pengolahan, atau pengembangan merek komoditas lokal. Akibatnya, kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah masih sangat terbatas, padahal pengelolaan yang profesional dapat menjadikan BUMD sebagai salah satu sumber penerimaan yang stabil (Machfud dkk., 2021; Sulaksana dkk, 2025).

Keempat, keterbatasan infrastruktur seperti jalan usahatani, irigasi, dan fasilitas pasca panen membuat biaya logistik tinggi dan kualitas produk belum konsisten, sehingga daya tawar petani lemah dan potensi penerimaan pajak daerah tidak tumbuh sesuai harapan.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa TKDD masih berperan positif namun lemah terhadap kemandirian keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer belum sepenuhnya dialokasikan untuk memperkuat kapasitas fiskal jangka panjang, seperti pengembangan hilirisasi agribisnis, melainkan lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin. Kondisi ini berbeda dengan temuan Suhyanto dkk. (2020) yang mencatat bahwa alokasi TKDD yang tepat sasaran pada infrastruktur pertanian mampu mempercepat pertumbuhan PAD di tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, jika potensi agribisnis dioptimalkan melalui rantai nilai yang utuh, sektor ini berpotensi besar menutup kesenjangan fiskal antar kabupaten di Jawa Barat, mengingat permintaan pangan dan produk olahan pertanian terus meningkat baik di pasar domestik maupun ekspor.

### PENUTUP (Kesimpulan dan saran)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan pengaruh TKDD terhadap kemandirian fiskal jauh lebih lemah. Meskipun sebagian besar kabupaten di Jawa Barat memiliki potensi agribisnis yang besar, kemampuan mengubahnya menjadi sumber PAD masih sangat terbatas karena dominasi penjualan bahan baku dan belum optimalnya pemanfaatan kewenangan fiskal baru, sehingga wilayah berbasis pertanian masih terjebak dalam ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan segera membangun rantai nilai agribisnis yang utuh melalui hilirisasi komoditas unggulan, menyusun kebijakan pajak dan retribusi yang adil berbasis UU HKPD, serta merevitalisasi BUMD pertanian untuk memperluas sumber pendapatan sendiri. Sebagian alokasi TKDD sebaiknya dialihkan untuk membiayai infrastruktur pertanian dan pengembangan usaha agroindustri, sehingga potensi ekonomi lokal dapat bertransformasi menjadi penggerak kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Provinsi Jawa Barat. (2025). Laporan Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Sektor Unggulan Jawa Barat Tahun 2024–2025. Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat.
- Dinar, D., Marina, I., Syamsiah, M., Umyati, S., & Sukmawati, D. (2026). Comparative Analysis of Integrated Crop Management (ICM) Implementation on Hybrid Maize Production and Farmers' Income (*Zea mays* L.). *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 12(2), 731–737.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2025. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Gunawan, M., & Marina, I. (2025). Peran Kecerdasaan Buatan Dalam Optimalisasi Produk Pertanian Di Era Digital. *Journal of Innovation and Research in Agriculture*, 4(1), 39–45.
- Juliana, E., Dewi, Y. A., & Marina, I. (2025). Analisis Efisiensi Usaha Opak Manis Gula Aren Di Desa Krisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang. *Journal of Sustainable Agribusiness*, 4(2), 126–135.
- Kristina, Y., dkk. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(2), 45–58.
- Lasminingrat, A., Marina, I., & Roswinna, W. (2025). Analisis Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian. *Journal of Sustainable Agribusiness*, 4(2), 136–142.
- Machfud, A., dkk. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Dana Otonomi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 9(1), 1–14.
- Mahmiludin, D., Marina, I., Hasnah, I. N., & Sukmawati, D. (2025). Analisis strategi pemasaran dan inovasi produk dalam pengembangan agribisnis mangga. *Journal of Sustainable Agribusiness*, 4(1), 9–25.
- Marina, I., & Nur'aeni, A. (2025). Analisis efisiensi rantai pasok mangga gedong gincu di Majalengka: Masalah, teknologi, dan strategi solusi. *Journal of Innovation and Research in Agriculture*, 4(1), 1–9.
- Marina, I., & Sukmawati, D. (2025). Analisis Dampak Ekonomi Sistem Pemantauan Cerdas Pada Produksi Kedelai. *Journal of Sustainable Agribusiness*, 4(2), 81–87.
- Marina, I., Adi, A., Lestari, M. D., Napitupulu, T. S., Hadi, S., & Faisal, H. N. (2026). *Hulu ke Hilir: Inovasi Manajemen dan Rantai Nilai Agribisnis Modern*. Bandung: PT Ghani Press Group.
- Marina, I., Mukhlis, M., & Harti, A. O. R. (2024). Development strategy of leading agricultural commodities: Findings from LQ, GRM, and shift-share analysis. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 24(2), 181–190.
- Marina, I., Sukmawati, D., & Mahmiludin, D. (2025). Pengaruh Teknologi Off-Season Terhadap Produksi Dan Pendapatan Petani Mangga Gedong Gincu. *Journal of Innovation and Research in Agriculture*, 4(2), 89–95.
- Marina, I., Sukmawati, D., Juliana, E., & Safa, Z. N. (2024). Dinamika Pasar Komoditas Pangan Strategis: Analisis Fluktuasi Harga Dan Produksi. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 12(1), 160–168.
- Marina, I., Sukmawati, D., Roswinna, W., Marina, S., Ghifari, S. A., & Falahudin, A. (2025). Meningkatkan nilai ekonomi Ubi Cilembu melalui transformasi pemasaran dan kolaborasi masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 820–826.
- Miar, F., dkk. (2024). Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Oates, W. E. (2005). Toward a Theory of Fiscal Federalism. *International Tax and Public Finance*, 12(4), 349–365.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 1.
- Ramadhan, M., dkk. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), 23–34.
- Roswinna, W., Marina, I., Sukmawati, D., Priatna, D. K., Yulianti, M. L., & Dasipah, E. (2024). Structured planning for strengthening marketing and distribution capacity of Cilembu sweet potato products. *Journal of Sustainable Agribusiness*, 3(1), 1–16.
- Setyawan, B. (2023). Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Kebijakan, Tantangan, dan Dampak bagi Kemandirian Fiskal Daerah. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.
- Shalshyabilla, R., dkk. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 67–82.
- Suhyanto, A., dkk. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(2), 112–125.
- Sukmawati, D., Dasipah, E., Nurlaela, I., Mahmiludin, D., & Marina, I. (2025). Efektivitas Model Closed Loop dalam Agribisnis Cabai Rawit: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. *Journal of Sustainable Agribusiness*, 4(2), 71–80.
- Sukmawati, D., Kaffah, S., Marina, I., & Roswinna, W. (2025). Transformasi digital dalam pemasaran produk pertanian: Analisis kritis terhadap strategi, tantangan, dan implikasinya. *Journal of Sustainable Agribusiness*, 4(1), 16–21.
- Sulaksana, J., Marina, I., Fatimah, I. (2024). Optimization Of Gedong Gincu Mango Distribution Costs In Majalengka District. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(1), 288–309.
- Sulaksana, J., Marina, I., Saputra, F., & Hidayat, Y. (2025). Sustainability Dimensions of Gedong Gincu Mango Farming: a Case Study in Majalengka Regency, West Java Province, Indonesia. *Anuário do Instituto de Geociências*, 48, e66097.